

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL PSIKOLOGIS KORBAN BENCANA MERAPI ***(Sosial Impact of Psychological Treatment Merapi Disaster Victims)***

Chatarina Rusmiyati

Email: cathy.mami@yahoo.com
dan

Eddy Hikmawati

Abstrak

Hidup di tempat pengungsian yang penuh dengan keterbatasan sering menimbulkan ketidakpastian sampai kapan mereka akan tinggal. Hal ini berkaitan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan pengganti tempat tinggal yang permanen, di samping kemampuan dari korban bencana itu sendiri. Lokasi pengungsian kurang memadai ditinjau dari kepadatan hunian, asupan gizi, sarana MCK, sanitasi lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kondisi ini dapat menyebabkan pengungsi terutama anak-anak dan lansia rawan terhadap penyakit. Ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan seringkali tidak seimbang dengan jumlah korban bencana yang membutuhkan penanganan kesehatan. Penanganannya harus dilakukan secara terkoordinir dan terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, LSM, dunia usaha dan pemerintah terkait. Pada intinya dari hasil wawancara dan observasi pada informan dapat disimpulkan bahwa para pengungsi telah ditangani secara fisik, psikis dan sosial. Pemenuhan kebutuhan fisik meliputi pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, air bersih dan sarana MCK. Pemenuhan kebutuhan psikis dengan menghilangkan trauma (trauma healing) seperti menghibur, memberikan pembinaan mental psikologis agar tidak jenuh, pelayanan penguatan mental keagamaan, pendidikan dan informasi. Pemenuhan kebutuhan sosial dengan menerima kunjungan tamu, advokasi dan fasilitasi kegiatan. Pemenuhan kebutuhan sosial psikologis di pengungsian dapat dikatakan terpenuhi meskipun serba terbatas. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah khususnya Kementerian Sosial dan lembaga terkait, dalam memberikan bantuan kepada korban perlu melakukan analisis kebutuhan agar tepat sasaran. Kepada masyarakat di daerah rawan bencana perlu peningkatan kesadaran tentang risiko bencana melalui sosialisasi dan simulasi siaga bencana, agar masyarakat berdaya menghadapi bencana dan risikonya.

Kata Kunci: Penanganan, Pengungsi, Korban Bencana Merapi

Abstract

Living in refugee camps filled with limitations often lead to uncertainty for how long they will stay. This relates to the ability of the government to provide a permanent replacement dwelling, in addition to the ability of victims of the disaster itself. Inadequate evacuation in terms of residential density, nutrition, sanitary facilities, sanitation, social facilities and public facilities. This condition can lead to refugees, especially children and the elderly prone to disease. Availability of health personnel, drugs are often not balanced by the number of victims requiring medical treatment. Handling should be done in a coordinated and integrated with the involvement of the whole society, NGOs, businesses and government agencies. In essence, from interviews and observations of informants can be concluded that the refugees had been handled social needs food, clothing, shelter, health care, clean water and sanitary facilities, and services, including capital and attempted reintegration. Psychologically form of mental strengthening religious services, education and information. Fulfillment of sosial needs in the camps can be said psychological fulfilled despite limited. It is therefore recommended to the government especially the Ministry of Sosial Affairs and related agencies, in providing assistance to victims should conduct a needs analysis to be right on target. To communities in disaster prone areas need to increase awareness of disaster risks through awareness and disaster preparedness simulations, so that empowered communities for disasters and risks.

Keywords: Management, Refugees, Disaster Victims Merapi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan banyak pulau, terletak pada jalur gempa bumi dan gunung berapi. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam. Di Indonesia terdapat 129 gunung berapi aktif, 70 diantaranya digolongkan sangat berbahaya. Keberadaan gunung berapi membawa dampak kesuburan bagi tanah di sekitar, sehingga banyak penduduk yang bermukim. Namun dibalik itu terdapat bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kerusakan alam dan kehancuran lingkungan apabila terjadi bencana gunung meletus. Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit dihindari dan diperkirakan secara tepat. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur, lingkungan sosial, dan gangguan terhadap tata kehidupan serta penghidupan masyarakat yang telah mapan sebelumnya.

Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Sejak meletus pada tanggal 26 Oktober 2010, menurut data Pusat Pengendalian dan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dirilis pada tanggal 11 Nopember 2010 jumlah korban tewas mencapai 194 orang. Aliran awan panas yang dimuntahkan lava/material Merapi pada hari Jumat malam 5 Nopember 2010 dengan kecepatan mencapai 100 km per jam, dan panas mencapai kisaran 450-600 derajat celsius, membakar pepohonan dan rumah-rumah sehingga dilakukan evakuasi penduduk secara besar-besaran. Kondisi tersebut memaksa pemerintah memperlebar zona bahaya hingga berjarak 20 km dari puncak Merapi, yang sebelumnya ditetapkan dengan radius 15 km.

Letusan Merapi memicu evakuasi massa di wilayah DI Yogyakarta (Sleman, Yogyakarta, Bantul) dan Jawa Tengah (Magelang, Klaten, Boyolali). Tempat-tempat pengungsian dipenuhi lebih dari 370.000 jiwa. Korban Merapi

mengalami trauma karena kehilangan orang yang dicintai, harta benda, hancurnya rumah dan sawah yang menjadi mata pencaharian mereka selama ini. Kondisi di pengungsian yang tak layak menambah tekanan jiwa semakin berat. Semakin lama waktu yang dihabiskan di pengungsian, berdampak pada jumlah pengungsi yang mengalami gangguan psikologis. Hasil observasi dan pendampingan yang dilakukan relawan menyimpulkan bahwa sebagian besar pengungsi mengalami tekanan psikologis akibat bencana gunung Merapi. Dari sampel 50 orang pengungsi yang diklasifikasi berdasarkan kelompok umur, 60 persen memerlukan terapi psikologi. (Harian Kedaulatan Rakyat, 3 Januari 2011). Menurut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, sebagian kondisi pengungsi labil dan tertekan di tempat pengungsian. Bahkan, belum genap dua minggu tinggal di pengungsian, sebanyak 27 pengungsi sudah dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. Soerodjo Kota Magelang. Mereka diindikasikan mengalami stres dan trauma berat pasca erupsi eksplosif Merapi. Harta benda mereka habis, bahkan banyak keluarga meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara data yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Soejarwadi, Klaten, tercatat 19 orang pengungsi masuk dalam kategori gangguan jiwa berat. Jadi total pengungsi yang “gila” sementara ini ada 46 orang (dari Magelang dan Klaten).

Korban bencana alam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat kompleks, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Problema paling mendasar adalah persoalan fisik, seperti gangguan pemenuhan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berawal dari, tidak tersedia atau terbatasnya fasilitas umum, sosial dan sanitasi lingkungan yang buruk sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat menjadi sumber penyakit. Kehilangan harta benda menyebabkan korban menjadi jatuh miskin, apalagi sumber matapencaharian

berupa lahan pertanian dan perkebunan juga mengalami kerusakan. Kehilangan anggota keluarga, khususnya sumber pencari nafkah keluarga, seringkali menyebabkan timbulnya perasaan khawatir, ketakutan bahkan trauma yang berkepanjangan. Bantuan dari berbagai sumber yang berbentuk materi mungkin dapat memenuhi kebutuhan fisik para korban bencana, tetapi belum tentu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kehilangan orang yang dicintai, rumah, harta benda, sawah, atau ternak yang menjadi mata pencarian, dapat menyebabkan guncangan jiwa dan trauma hebat.

Keterpurukan lain yang dihadapi menyangkut masalah psikososial, seperti kekhawatiran akan terjadi letusan susulan, rasa kehilangan yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga, harta benda dan sumber mata pencaharian seringkali menimbulkan kesedihan berkepanjangan. Selain itu, dengan terpaksa harus tinggal di pengungsian dalam kondisi yang serba terbatas menambah rasa cemas para pengungsi. Hal yang memperparah kondisi para pengungsi adalah mereka mudah tersulut api konflik dengan sesama pengungsi akibat jenuh. Sebagian besar pengungsi bermatapencaharian sebagai petani yang setiap hari terbiasa bekerja keras, sementara yang terjadi di tempat pengungsian mereka hanya diam saja tanpa berkegiatan, membuat mereka bosan. Kurang terpenuhinya kebutuhan hidup, tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran keluarga serta kemungkinan-kemungkinan hilangnya pengendalian diri, kekecewaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah dapat berpotensi menjadi aksi sosial. Pengungsi pun kehilangan harga diri dan rasa percaya diri, sehingga terkesan pasrah, putus asa, tidak berdaya dalam menghadapi masa depan, cenderung menyalahkan orang/pihak lain yang dianggap menambah beban hidup mereka, bergantung pada bantuan pemerintah dan pihak lain, serta menyalahkan Tuhan atas musibah

yang menimpa. Mereka menolak direlokasi ke tempat baru, padahal tempat asalnya tidak memungkinkan lagi untuk dihuni.

Dalam situasi yang demikian maka diperlukan upaya penanganan dampak sosial psikologis terhadap korban agar terhindar dari gangguan psikologis dan permasalahan sosial yang lebih luas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi yang telah dilakukan. Oleh karena itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi di tempat pengungsian? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi.

Pengungsi Sebagai Korban Bencana

Pengungsi akibat bencana alam adalah orang-orang yang terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka sebagai akibat atau dalam rangka menghindarkan diri dari bencana alam dan berpindah ke daerah yang lebih aman. Definisi dari *United Nation Hight Commission for Refugees* (UNHCR) menyebutkan bahwa pengungsi adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya karena adanya unsur pemaksa seperti bencana alam berupa banjir, kekeringan, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor, gelombang pasang air laut, tsunami, wabah penyakit dan peperangan. Tujuan orang mengungsi adalah untuk mencari tempat yang lebih aman demi keselamatan diri dan keluarga. Pengungsi jika dilihat dari kelompok umur dapat dibedakan menjadi pengungsi anak-anak, pengungsi dewasa dan pengungsi lanjut usia. Pengungsian bisa dilakukan secara individu, bersama-sama atau dalam kelompok dengan persiapan ataupun tanpa persiapan sama sekali. Pengungsian bisa untuk sementara waktu ketika kondisi masih dalam bahaya dan dapat kembali ke tempat asal ketika keadaan sudah aman

dan kehidupan sudah normal kembali. Akan tetapi pengungsian bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama bahkan tidak menentu karena terjadinya perubahan kondisi tempat asal, misalnya daerahnya menjadi tidak layak huni dan termasuk zona merah, sehingga mereka tidak mungkin bisa kembali. Dari pengertian di atas maka pengungsi dapat dikategorikan sebagai korban bencana.

Status pengungsi sering diidentikkan dengan seseorang atau sekelompok orang yang perlu dikasihani dan dibantu karena ketidakberdayaannya, meskipun demikian pengungsi tetap mempunyai hak asasi sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) pengungsi sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, adalah hak untuk memeluk agama, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan, meminta dan menerima perlindungan bantuan humaniter, kebebasan berpindah, rasa aman, pendidikan serta memperoleh informasi tentang keberadaan sanak saudara. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengungsi adalah mereka yang menjadi korban letusan Gunung Merapi dan terpaksa tinggal di pengungsian.

Pengungsi dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Pengungsi sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat yang sedang menghadapi masalah, mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan hidup itu tidak dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang lama maka akan menjadi masalah sosial, sehingga manusia dan masyarakat tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan dasar manusia menurut Elizabeth Nicolds (1965: 59) meliputi:

- a. Rasa aman (*security*) dari ancaman lingkungan manusia dan alam serta rasa aman dari gangguan penyakit.
- b. Kasih sayang (*affection*) baik dari keluarga maupun masyarakat lingkungannya.
- c. Mencapai cita-cita (*achievement*) dalam kondisi kehidupan sesuai yang diinginkan.
- d. Penerimaan (*acceptance*) eksistensi diri ditengah masyarakat sekitarnya.

LP Getubig dan Sonke Schmidt (1992) mengemukakan bahwa individu dan kelompok orang atau masyarakat dapat dikatakan aman secara sosial (*sosially secured*) apabila terpenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek:

- a. Pendapatan yang tetap dan cukup (*adequate and stable income*)
- b. Kesehatan (*health care*)
- c. Makan cukup gizi (*good nutrition*)
- d. Rumah tempat tinggal (*shelter*)
- e. Pendidikan (*education*)
- f. Air bersih (*clean water*)
- g. Sanitasi (*sanitation*)
- h. Penyantunan anak dan lanjut usia (*child and old age care*)

Sementara Laird dan Laird (dalam Sumarnonugroho, 1984: 6) mengemukakan kebutuhan dasar hidup manusia meliputi:

- a. Hidup
- b. Merasa aman
- c. Penghargaan atas eksistensi dirinya
- d. Melakukan pekerjaan yang disenangi.

Selanjutnya aspek kebutuhan dasar hidup manusia menurut Maslow adalah:

- a. Kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan udara untuk bernafas.
- b. Rasa aman.
- c. Menyayangi dan disayangi
- d. Penghargaan diri
- e. Aktualisasi diri.

Kebutuhan dasar manusia tersebut di atas dalam kondisi yang normal dapat dengan mudah terpenuhi apabila alam dan lingkungan manusia mendukung, dalam arti sedang tidak terjadi bencana. Sebaliknya apabila alam dan lingkungan tidak mendukung karena sedang terjadi bencana maka kebutuhan dasar manusia itu kadang-kadang sulit terpenuhi, maka untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, manusia tersebut memerlukan intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini manusia sebagai pengungsi memerlukan bantuan orang lain agar tetap dapat bertahan hidup di tempat pengungsian.

Dalam panduan pengungsi internal yang dikeluarkan oleh PBB Koordinator Urusan Kemanusiaan (OCHA), kebutuhan perlindungan bagi pengungsi meliputi lima prinsip yaitu:

- a. Perlindungan umum meliputi hak memperoleh persamaan perlakuan hukum, kebebasan bersuara, perlindungan dari tindak diskriminasi, dan perlindungan khusus terutama untuk pengungsi anak-anak, ibu hamil, perempuan kepala rumah tangga, lanjut usia serta orang cacat.
- b. Perlindungan terhadap kemungkinan paksaan jadi pengungsi karena diskriminasi warna kulit, pembersihan etnis, agama dan politik.
- c. Perlindungan selama masa pengungsian internal dari tindak genoside, pembunuhan, penculikan, penahanan, kekerasan, perampokan, penyanderaan, pemerkosaan, penghukuman kerja, penyiksaan, pencacatan, perbudakan, eksploitasi, pelecehan seksual, pengkekangan gerak, pemaksaan ikut bertikai, penurunan martabat, moral dan mental. Pengungsi juga memperoleh hak untuk mengetahui tentang keberadaan keluarganya dan dipertemukan kembali, pemakaman yang layak apabila meninggal, memperoleh informasi tentang pilihan hidup yang lebih baik, pergi ke negara lain yang dipandang aman dan mencari suaka ke negara lain.

- d. Bantuan kemanusiaan berupa makanan, pakaian, kesehatan atau obat-obatan, pendidikan, hiburan, dan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah dan pihak swasta harus menjamin kelancaran dan keamanan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut sehingga terhindar dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan berbagai hambatan birokrasi.
- e. Bantuan pemulangan, relokasi dan integrasi dengan masyarakat tempat pengungsi berada. (Gunanto Surjono, dkk. 2004: 7).

Lima prinsip di atas telah mencakup kebutuhan dasar manusia baik fisik, psikis maupun sosial.

Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana

Peristiwa bencana membawa dampak bagi warga masyarakat khususnya yang menjadi korban. Beberapa permasalahan yang dihadapi korban bencana meletusnya Gunung Merapi yaitu:

- a. Kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu atau bisa terjadi untuk seterusnya, karena merupakan kawasan rawan bencana (termasuk dalam zona merah).
- b. Kehilangan mata pencaharian karena kerusakan lahan pertanian dan hancurnya tempat usaha.
- c. Berpisah dengan kepala keluarga karena ayah atau suami banyak yang memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan menjaga rumah, harta benda dan tetap bekerja sebagai petani, berkebun atau peternak.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa makan, minum, tempat tinggal sementara atau penampungan, pendidikan, kesehatan dan sarana air bersih yang tidak memadai. Tidak tersedia atau terbatasnya fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- e. Terganggunya pendidikan anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kerusakan sarana dan prasarana sekolah.

- f. Risiko timbulnya penyakit-penyakit ringan (batuk, flu) ataupun penyakit menular (misalnya diare) karena kondisi lingkungan dan tempat penampungan yang kurang bersih dan tidak kondusif serta sarana pelayanan kesehatan yang kurang memadai.
- g. Terganggunya fungsi dan peran keluarga karena dalam satu tempat penampungan tinggal beberapa keluarga sekaligus. Tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran keluarga serta kemungkinan-kemungkinan hilangnya pengendalian diri dapat menimbulkan potensi konflik dengan sesama pengungsi akibat jenuh, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.
- h. Hilangnya harga diri dan kemampuan baik sebagai individu maupun sebagai keluarga karena di tempat pengungsian mereka menerima belas kasihan dari pihak lain dan bahkan seringkali menjadi tontonan. Kecewa pada pemerintah atau pihak-pihak lain yang tidak dapat meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi dan kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang berpotensi menjadi aksi sosial.
- i. Terhambatnya pelaksanaan fungsi dan peran sosial dalam kekerabatan serta pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dalam kemasyarakatan, misalnya: kegiatan arisan, kegiatan adat atau budaya yang tidak dapat dilaksanakan di lokasi pengungsian.
- j. Kejenuhan akibat ketidakpastian berapa lama harus mengungsi, perasaan tidak berdaya, ketakutan dan bahkan perasaan putus asa menghadapi kemungkinan bencana yang tidak mungkin dihindari (tidak dapat melawan kehendak Tuhan). Akibatnya timbul perasaan marah, stres atau frustrasi dengan situasi dan kondisi yang serba tidak menentu, trauma, putus asa, merasa tidak berdaya dan ketidakpastian terhadap masa depannya.
- k. Berfikir tidak realistis dan mencari kekuatan supra natural untuk mencegah terjadinya bencana. Kekecewaan spiritual yaitu kecewa

pada Tuhan karena diberi ujian atau hukuman bahkan cobaan kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. (Marjono, 2010).

Penanganan Korban Bencana

Pelayanan sosial pengungsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dalam skala internasional, nasional ataupun tingkat lokal untuk memberi perlindungan hukum, keamanan, pemenuhan kebutuhan pangan, pakaian, shelter, obat-obatan, pelayanan administratif kependudukan, reintegrasi dengan keluarga dan relokasi. Menurut Allen Pansus dan Anne Minahan (dalam Gunanto Surjono, dkk., 2004), pelayanan sosial ditujukan untuk menolong orang-orang yang mengalami permasalahan sehari-hari dalam keluarga, anak-anak yang mengalami hambatan belajar di sekolah, orang yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan guna menghidupi dirinya dan beberapa kondisi kehidupan traumatis seperti kedukaan, perpisahan dengan keluarga, menderita suatu penyakit dan masalah keuangan sebagai penopang hidup.

Demikian juga Sukamdi (dalam Gunanto Surjono, 2004) mengemukakan bahwa tindakan pelayanan kepada pengungsi adalah untuk:

- a. Proteksi, khususnya terhadap perempuan, anak-anak dan lanjut usia.
- b. Pemberian fasilitas untuk kembali ke pemukiman asal perantauan atau lokasi baru.
- c. Menyelesaikan akar permasalahan penyebab pengungsian agar dikemudian hari tidak terjadi masalah pengungsian yang sama.

Selanjutnya Eddy Ch Papilaya (2003) mengemukakan bahwa pemberdayaan pengungsi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

- a. Pendidikan dan pembangkitan kesadaran. Pendidikan dan pembangkitan kesadaran mencakup tiga unsur yaitu: 1) Pendidikan formal terutama bagi pengungsi anak-anak agar tidak terlalu tertinggal dengan

pendidikan anak-anak lain yang bukan pengungsi, 2) Pendidikan informal untuk pengungsi dewasa yang bisa berlangsung setiap waktu dengan tujuan untuk menanamkan nilai, pengetahuan, keterampilan, akses informasi usaha ekonomis produktif dengan memanfaatkan sumber alam, manusia dan sosial sekitarnya. Pendidikan informal dapat dilakukan melalui pendampingan, bimbingan dan konsultasi, 3) Pendidikan non-formal yang berorientasi pada pemberdayaan hukum, demokrasi, ekonomi produktif, advokasi pemenuhan hak azasi kehidupan dan kekerasan gender.

b. Pelibatan Kebijakan dan Perencanaan Elitis

Dalam hal ini untuk mempengaruhi kebijakan elit pengambil keputusan mempunyai kompetensi dalam sektor keamanan, sistem ekonomi, penyediaan akses lembaga keuangan, fasilitas informasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, layanan administrasi kependudukan, dan penyediaan sarana sekolah formal. Kebijakan dan perencanaan elitis digunakan untuk menghindari permasalahan lanjut, seperti stres berkepanjangan, kekecewaan, frustrasi, tindak negatif, pemiskinan, pembodohan, dan ketertinggalan sebagai akibat lama mengungsi tanpa intervensi dari pihak pengambil kebijakan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya masyarakat yang dimarginalkan, *sosial cost* atau *generation lost*.

c. Aksi Sosial Politik

Aksi sosial politik dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam masyarakat pengungsi sendiri, mulai dari perencanaan, identifikasi masalah, penentuan skala prioritas, tujuan, implementasi dan pemantauan, serta evaluasi akhir dalam proses rehabilitasi pengungsi.

Program pemberdayaan bagi pengungsi tidak dapat tercapai secara maksimal apabila dilaksanakan di tempat pengungsian, akan lebih baik apabila dilaksanakan di tempat asal

apabila memungkinkan atau di tempat baru yang lebih aman. Pemberdayaan masyarakat pengungsi tidak cukup dilakukan pemerintah saja, tetapi harus melibatkan pihak lain seperti swasta, LSM, masyarakat lingkungan di mana pengungsi berada, baik secara perorangan maupun terorganisir yang bekerja sama atas nama kemanusiaan (*for the sake of humanisme*). (Eddy Ch. Papilaya, 2003). Menurut panduan pengungsi yang dikeluarkan oleh PBB (OCHA) intervensi kepada pengungsi mengandung prinsip tidak ada larangan secara formal bagi lembaga manapun yang akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi.

Fancois J. Tunner (dalam Gunanto Surjono, dkk., 2004:10) mengemukakan bahwa dalam penanganan pengungsi tidak ada satu aspek penanganan yang ditekankan dan didominasi (*overstressed and dominated*) tetapi semua unsur harus bekerja sama saling mengisi kompleksitas kebutuhan pengungsi. Unsur pelayanan sosial pokok yang harus dilakukan bersama seperti pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, pakaian, keamanan/pendidikan, relokasi dan perlindungan hukum. Sedangkan unsur penunjang meliputi publikasi, simpati masyarakat lingkungan dan semangat hidup dari pengungsi sendiri.

Langkah yang dilakukan dalam upaya penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi antara lain:

a. Advokasi, yaitu melindungi dan mengupayakan kepastian mengenai pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara layak dan memadai.

b. Intervensi keluarga.

Keluarga-keluarga pengungsi yang kehilangan kepala keluarganya perlu mendapatkan pelayanan khusus karena (barangkali) seorang istri atau ibu harus mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah. Pengertian, dukungan dan partisipasi

semua anggota keluarga sangat dibutuhkan. Agar masa transisi peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan dukungan dari berbagai pihak sehingga fungsi keluarga dapat pulih kembali dan stabilisasi peran keluarga dapat dicapai.

c. Terapi kritis.

Tidak sedikit masyarakat yang menolak untuk direlokasi, tidak puas dan merasa tidak berdaya dengan situasi dan kondisi baru yang berbeda dengan keseharian mereka sebelumnya. Perasaan-perasaan tersebut seringkali menimbulkan gangguan psikis, seperti kecemasan dan insomnia, stres, frustrasi dan selalu ada kemungkinan timbul aksi sosial atau konflik. Layanan ini diberikan kepada individu-individu yang mengalami stress atau trauma karena kejadian bencana itu sendiri, karena kehilangan harta benda atau karena kehilangan anggota keluarganya. Terapi yang dilakukan antara lain pengungkapan perasaan-perasaan negatif yang dilanjutkan dengan pembelajaran sederhana mengenai cara membangun perasaan-perasaan yang positif dan bekerja bersama-sama dengan kelompok untuk menginventarisasi hal-hal positif yang dapat dilakukan di daerah yang baru dan menyusun rencana kegiatannya.

d. Membangun partisipasi

Pengungsi perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan di barak-barak pengungsian (dapur umum, latihan keterampilan dan kegiatan lain) untuk mengalihkan perasaan-perasaan kontra produktif, dan dalam menyusun rencana *recovery*.

e. Mediasi dan fasilitasi relokasi dengan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah tujuan yang baru agar dapat menerima kehadiran para pengungsi yang direlokasi ke daerah mereka. (Marjono, 2010).

Selain langkah-langkah tersebut dukungan sosial dari keluarga atau sesama pengungsi sangat membantu korban untuk bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi yang

dialami saat ini. Pengungsi yang mengalami gangguan penyesuaian diri biasanya mengalami insomnia, hipertensi dan psikosomatis. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan untuk segera pulang ke rumah, tidak betah tinggal di pos pengungsian, tidak mau makan dan tidak mau bicara. Untuk kasus yang berat, biasanya mereka mengalami ketakutan secara terus menerus, sering menangis, dan mengalami halusinasi. Mereka kebanyakan juga mengalami insomnia, tidak tenang dan cemas secara berlebihan.

Penanganan masalah sosial psikologis pengungsi pada dasarnya untuk membantu manusia yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, karena adanya faktor penghambat seperti terjadinya bencana sehingga harus mengungsi di tempat yang dianggap aman. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan sosial atau intervensi harus menggunakan pendekatan kemanusiaan agar tidak menyinggung perasaan orang-orang yang diberi pelayanan. Allen Pancus dan Anne Minahan yang dikutip Gunanto Surjono, dkk., 2004 mengemukakan bahwa untuk dapat melakukan penyelesaian masalah sosial dengan baik harus melibatkan sistem sumber (*resources system*) yang meliputi:

- a. Sumber informal, berasal dari keluarga, teman, tetangga dan masyarakat sekitar yang diberikan secara spontan.
- b. Sumber formal, berasal dari organisasi (pemerintah atau swasta) baik yang menyandang masalah sebagai anggota organisasi bersangkutan maupun bukan anggota (di luar) organisasi.
- c. Sumber sosial, berasal dari organisasi yang dibentuk secara khusus untuk memberikan intervensi pertolongan pada saat khusus dan tertentu (*given situation*).

Dalam praktek penggalian sumber tersebut di atas diperlukan kerjasama secara terpadu untuk saling melengkapi agar misi pelayanan sosial dapat dilaksanakan tepat sasaran, tercapai

tujuan dan sesuai harapan. Kementerian Sosial dalam penanganan korban bencana alam membedakan empat tahapan kegiatan yaitu tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi sosial serta sosialisasi dan rujukan. Dalam setiap tahapan menekankan pada adanya koordinasi antar instansi terkait (Dinas Sosial, BNPB, Dinas Kesehatan) dengan unsur masyarakat, LSM dan dunia usaha dalam satu komando. Tanggap darurat adalah kegiatan memobilisasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengkonsolidasikan diri melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan korban bencana alam. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus bahasan adalah upaya penanganan dampak sosial psikologis dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial ketika korban bencana masih berada di tempat pengungsian atau dibatasi pada tahap tanggap darurat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dilaksanakan di tempat pengungsian Hargobinangun, Kepuharjo, Girikerto, dan Wonokerto Kabupaten Sleman. Sumber data penelitian adalah korban Merapi baik anak maupun orangtua dan relawan baik secara individu maupun terorganisir (LSM). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara untuk mengungkap berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanganan dampak sosial psikologis korban bencana Merapi. Observasi tentang kondisi pengungsi di tempat pengungsian dan telaah dokumen yang terkait dengan kondisi wilayah dan jumlah korban. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Langkah dalam analisis kualitatif dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi data, data yang diperoleh difokuskan

pada permasalahan yang diteliti.

3. Display data, menunjukkan data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu menelusuri makna atau interpretasi terhadap hasil temuan penelitian, bila kesimpulan masih meragukan data dapat ditambah. (Moleong, 2002).

Keabsahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang absah dan kredibel, maka peneliti melakukan:

1. Memperpanjang waktu penelitian, bila data dianggap belum cukup.
2. Triangulasi, mengkonfirmasi data dari beberapa sumber/informan yang berbeda peran, status dan jabatannya.
3. Diskusi teman sejawat, data dan temuan lapangan didiskusikan pada teman sejawat untuk mendapatkan masukan yang benar.

PEMBAHASAN

Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Gunung Merapi

Wilayah Bencana di Sleman

Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan luas wilayah 7574,82 km² atau 18% dari luas wilayah DIY. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuloprogo dan Kabupaten Magelang, dan sebelah selatan berbatasan dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Sleman secara administratif, terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 pedukuhan.

Wilayah Kabupaten Sleman merupakan kawasan Lereng Gunung Merapi, di mulai dari jalan yang menghubungkan Kota Yogyakarta

dengan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (rightbelt) sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan potensi ekowisata yang berorientasi pada aktivitas Gunung Merapi dan ekosistemnya. Daerah yang terkena erupsi Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 adalah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten. Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak letusan Gunung Merapi. Kerusakan akibat letusan Gunung Merapi tersebut mencapai sekitar 2.300 kepala keluarga yang kehilangan rumah dan ratusan orang meninggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data yang dilaporkan pada tanggal 6 Nopember 2010 mencapai 116 orang, jumlah korban meninggal, di Sleman tercatat sebanyak 104 orang. Sementara jumlah total pengungsi Merapi hingga saat itu sebanyak 198 ribu, 56 ribu orang diantaranya di Kabupaten Sleman.

Data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyebutkan jumlah korban bencana erupsi Gunung Merapi bertambah menjadi 277 orang sampai dengan tanggal 2 Desember 2010. Bertambahnya data korban meninggal ini diantaranya merupakan hasil evakuasi di lokasi bencana dan dari barak pengungsian, baik yang meninggal karena sakit maupun karena usia lanjut.

Beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi terparah adalah di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi dan Tempel, yang masih berada dalam radius 15 km dari Merapi. Warga masyarakat meninggalkan desa dan mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman seperti posko pengungsian maupun ke rumah sanak saudara yang berada dalam radius aman, karena abu vulkanik yang sangat tebal sehingga mengganggu aktivitas keseharian mereka. Posko pengungsian yang ada di Sleman tersebar di Kecamatan Cangkringan yaitu Posko Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo,

dan Wukirsari. Kecamatan Pakem di Posko Purwobinangun dan Hargobinangun, sementara Kecamatan Turi di Posko Girikerto dan Wonokerto.

Meletusnya Gunung Merapi melumpuhkan berbagai sektor, baik pariwisata, perhotelan, pertanian, peternakan, maupun perikanan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan rupiah. Berdasar pendataan yang telah dilakukan, erupsi Merapi di wilayah Kabupaten Sleman, mengakibatkan kerusakan senilai Rp 894,35 miliar dan kerugian senilai Rp 4,51 triliun atau total perkiraan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 5,405 triliun. Angka kerugian dan kerusakan tersebut meliputi sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. (Pembab Sleman, 2011)

Penanganan Dampak Sosial Psikologis

Kejadian bencana membawa dampak bagi warga masyarakat khususnya yang menjadi korban. Permasalahan nyata yang dialami korban bencana antara lain kondisi dalam penampungan atau pengungsian, terceraiberainya tatanan keluarga baik selama proses pelarian maupun pengungsian, melemahnya semangat kemasyarakatan karena padatnya kampung-kampung pengungsian, deprivasi dan keterbatasan akses karena pengungsi datang tanpa bekal yang memadai, sementara sumber fasilitas pelayanan setempat terbatas. Jika pengungsi tinggal relatif lama berpotensi untuk bersaing dalam mendapatkan akses dengan masyarakat setempat sehingga memicu terjadinya konflik. Adanya trauma sosial psikologis karena ketidakberdayaan secara fisik, ekonomi maupun sosial yang dialami sendiri maupun orang-orang terdekat selama di pengungsian. Penanganan dampak sosial psikologis korban bencana erupsi Merapi akan dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial.

Pemenuhan kebutuhan fisik

Masalah mendasar yang dihadapi oleh korban bencana termasuk korban meletusnya Gunung Merapi adalah pemenuhan kebutuhan fisik, seperti makan, minum dan tempat tinggal yang aman. Pemenuhan kebutuhan fisik ini penting karena penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana ketika Merapi meletus harus segera menyelamatkan diri menuju ke tempat aman atau barak pengungsian yang sudah disediakan pemerintah seperti di balai desa yang letaknya memang lebih aman. Dalam kondisi panik dan tergesa-gesa mereka pergi meninggalkan rumah tanpa membawa bekal apapun guna menyelamatkan diri. Menghadapi situasi demikian pemenuhan kebutuhan fisik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera disediakan. Kebutuhan dasar manusia dengan mudah dapat terpenuhi apabila alam dan lingkungan manusia mendukung. Sebaliknya apabila alam dan lingkungan tidak mendukung karena sedang terjadi bencana maka kebutuhan dasar manusia kadang-kadang sulit terpenuhi. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan intervensi pihak lain.

Hasil pengamatan di beberapa tempat pengungsian terlihat bahwa bantuan dari masyarakat khususnya pangan dan sandang cukup banyak, bahkan bisa dikatakan melimpah, seperti beras, mie instan, makanan ringan, makanan bayi, air mineral dan pakaian pantas pakai. Hal tersebut didukung hasil wawancara dengan petugas di posko bencana yang menyatakan bahwa bantuan untuk pemenuhan kebutuhan fisik banyak mengalir baik secara perorangan maupun dari kelompok pengusaha, organisasi sosial, dan instansi pemerintah. Penyediaan pemenuhan kebutuhan makan dan minum bagi pengungsi didirikan dapur umum di tempat pengungsian baik oleh relawan, korps marinir, korps angkatan darat, taruna siaga bencana (Tagana) maupun masyarakat. Di posko pengungsian Girikerto Sleman, korps

marinir membuka dapur umum untuk membantu memenuhi kebutuhan makan pengungsi. Kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan oleh marinir sehingga mereka dapat dengan cepat dan sigap menyediakan makan bagi pengungsi yang jumlahnya ribuan. Demikian juga di posko pengungsian Hargobinangun, dapur umum melibatkan tentara, relawan dan Tagana yang secara bahu membahu menyiapkan kebutuhan logistik pengungsi.

Selain kebutuhan makan, minum dan tempat tinggal, kebutuhan mendesak lainnya adalah kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dinas kesehatan dengan melibatkan relawan dari perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dengan kegiatan pemeriksaan rutin bagi pengungsi terutama anak-anak dan lansia. Hidup di pengungsian rentan terserang gangguan penyakit seperti flu, batuk, pilek (ISPA) dan diare. Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak nyaman, kurang bersih dan serba terbatas, selain itu juga karena kurang tersedianya air bersih dan sarana MCK. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan MCK, pemerintah melalui dinas pekerjaan umum menyediakan toilet umum yang bisa dipindahkan dan mendrop air bersih ke lokasi pengungsian.

Pemenuhan kebutuhan psikis

Selain kebutuhan fisik, hal yang tidak kalah penting adalah pemenuhan kebutuhan psikis sebagai dampak terjadinya gangguan psikologis pengungsi. Gangguan psikologis yang dialami pengungsi antara lain perasaan sedih akibat kehilangan keluarga yang mereka sayangi, kehilangan harta benda, rumah, matapencarian, dan merasa asing di tempat pengungsian. Kondisi pengungsian atau tempat berlindung yang tidak memadai, berdesak-desakan dan tidak adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan

lansia membuat mereka stress. Keamanan atas kepemilikan ternak, rumah dan harta benda lain yang ditinggalkan menjadikan perasaan khawatir bagi sebagian pengungsi.

Berbagai permasalahan tersebut memicu timbulnya gangguan psikologis dikalangan pengungsi. Penanganan yang dibutuhkan untuk mengurangi gangguan psikologis tersebut adalah menghilangkan trauma bagi para korban dengan menghibur mereka, memberi pelatihan dan pembinaan serta aktivitas lain agar mereka tidak jenuh. Para pengungsi yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani/peternak dengan rutinitas pekerjaannya membuat mereka sibuk, sementara di tempat pengungsian rutinitas pekerjaannya tidak bisa dilakukan. Mereka tidak terbiasa tanpa aktivitas sehingga bosan, jenuh dan stress berada di pengungsian. Kondisi tersebut menjadikan pengungsian kehilangan ekologi sosial yaitu kehilangan rutinitas harian yang biasa dijalani. Untuk menghilangkan kejenuhan tersebut mereka diberi hiburan dan pencerahan, walaupun hiburan hanya sementara sifatnya paling tidak mereka mendapatkan ketenangan dan melupakan sejenak beban mental mereka. Mereka diberi konseling ringan untuk mengurangi stress atau depresi. Melibatkan pengungsi khususnya para ibu dan remaja putri dalam kegiatan dapur umum sangat membantu untuk mengisi waktu sehingga tidak jenuh. Demikian juga bagi bapak-bapak dan pemuda dilibatkan sebagai relawan membantu evakuasi korban yang masih berada di lokasi bencana. Kesibukan tersebut akan mengurangi kesedihan dan memperkuat mental mereka karena berguna bagi orang lain.

Penanganan trauma juga dilakukan bagi anak-anak karena mereka belum tahu cara mengontrol emosi dan mungkin belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Relawan mengadakan aktivitas bermain seperti menggambar, mewarnai, dan permainan kelompok serta menyanyi, tujuannya untuk

menghilangkan kebosanan pada anak-anak selama dipengungsian. Selain itu juga mendengarkan cerita dari anak-anak sebagai upaya untuk meluapkan ekspresinya. Pada saat peneliti melakukan observasi terlihat anak-anak yang berada di pengungsian Hargobinangun sedang dikunjungi oleh beberapa Polisi Wanita (Polwan) dari Polres Sleman. Kedatangan mereka bertujuan untuk menghibur dan mengajak bermain anak-anak guna menghilangkan trauma atas kejadian yang baru saja mereka alami sekaligus untuk menghilangkan kejenuhan selama berada di pengungsian.

Pemenuhan kebutuhan sosial

Pengungsi yang berada di pengungsian harus rela tinggal bersama di barak pengungsian dengan berbagai macam karakter orang. Situasi dan kondisi kehidupan yang mereka alami di pengungsian sering memunculkan perasaan kecewa dan putus asa bahkan frustrasi karena ketidakjelasan dengan nasib mereka. Hal tersebut diperparah dengan kondisi yang mudah tersulut api konflik antar sesama pengungsi akibat jenuh (*burnout*). Sebagian besar korban bermatapencaharian sebagai petani dengan rutinitas aktivitas keseharian, sementara di tempat pengungsian mereka hanya diam saja sehingga mereka bosan. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, tidak optimalnya pelaksanaan fungsi dan peran keluarga serta kemungkinan-kemungkinan hilangnya pengendalian diri, kekecewaan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berpotensi menjadi pemicu timbulnya aksi sosial.

Penanganan kebutuhan sosial dapat dilakukan dengan memberikan hiburan bagi pengungsi untuk sejenak melupakan permasalahan yang dihadapi dan menghilangkan kejenuhan selama di pengungsian. Kunjungan para tamu yang memberi pelayanan sosial membuat para pengungsi merasa diperhatikan, diringankan penderitaannya, dan diakui

keberadaannya. Hiburan juga dimaksudkan untuk mengatasi mereka yang mengalami kesulitan bersosialisasi akibat keterpisahan keluarga, keterasingan dan keterlantaran, diperlukan adanya penelusuran (*tracing*) dan penyatuan (reunifikasi) kembali keluarga yang terpisah. Pelayanan konseling, bimbingan sosial, advokasi dan fasilitasi kegiatan bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan fungsi sosial agar mereka dapat hidup normal dalam masyarakat. Pembinaan dan penyuluhan diberikan bagi masyarakat pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan wilayahnya merupakan daerah rawan (zona merah) yang tidak mungkin untuk bisa ditempati kembali sehingga mereka harus direlokasi di tempat yang lebih aman. Korban Merapi diberi penyuluhan berkaitan tempat tinggal sementara agar mereka dapat menerima keadaan di tempat tinggal yang baru serta dapat beradaptasi di lingkungan yang baru. Hal tersebut penting dilakukan karena keberadaan rumah sebagai tempat perlindungan agar keluarga merasa nyaman dan aman dalam menjalankan kehidupan.

Diketahui bahwa berbagai kebutuhan pengungsi secara empirik selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya penanganan dampak sosial psikologis korban Merapi. Penanganan masalah sosial psikologis pengungsi pada dasarnya untuk membantu manusia yang sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan sosial atau intervensi harus menggunakan pendekatan kemanusiaan agar tidak menyinggung perasaan orang-orang yang diberi pelayanan. Berkaitan dengan itu maka dalam penanganan pengungsi tidak cukup dilakukan pemerintah saja, tetapi harus melibatkan pihak lain seperti LSM, masyarakat lingkungan di mana pengungsi berada, baik secara perorangan maupun terorganisir yang bekerja sama atas nama kemanusiaan.

KESIMPULAN

Korban bencana, khususnya pengungsi memerlukan berbagai kebutuhan agar dirinya dapat bertahan hidup dan bangkit kembali semangatnya untuk hidup bermasyarakat. Kebutuhan tersebut antara lain makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, air bersih dan sarana MCK. Pengungsi juga membutuhkan pelayanan psikososial, keagamaan, pendidikan, kependudukan, informasi, reintegrasi dan pelayanan untuk berusaha atau bekerja termasuk permodalan. Berbagai kebutuhan tersebut merupakan permasalahan pengungsi. Untuk itu diperlukan penanganan agar permasalahan kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan korban bencana tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga atau satu organisasi saja, tetapi diperlukan koordinasi dan keterpaduan program baik dari pemerintah, LSM, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan pihak-pihak yang peduli terhadap masalah korban bencana.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyaknya bantuan seringkali tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkan sehingga sulit didistribusikan dan bantuan kurang sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Di samping itu kurang maksimalnya koordinasi antar lembaga pemberi bantuan dapat memicu timbulnya konflik ditingkat akar rumput. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pengungsi korban Merapi di pengungsian dapat dikatakan terpenuhi meskipun serba terbatas, seperti kebutuhan air bersih dan sarana MCK masih dirasa sangat kurang. Kapasitas shelter yang kurang sesuai dengan jumlah pengungsi dan bercampurnya pengungsi laki-laki dan perempuan, anak-anak dan lansia memicu timbulnya stres dan rawan penyakit. Selanjutnya untuk menghilangkan trauma sosial psikologis dan kejenuhan di tempat pengungsian telah dilakukan berbagai aktivitas seperti hiburan, konseling, advokasi, *tracing* dan reunifikasi, informasi, penyuluhan

dan bimbingan sosial serta pelatihan-pelatihan sebagai bekal hidup di kemudian hari.

Saran yang dapat diberikan antara lain:

(a) Dalam memberikan bantuan kepada korban bencana (pengungsi) perlu, melakukan analisa kebutuhan agar tepat sasaran yaitu sesuai dengan kebutuhan, baik jenis maupun jumlahnya, (b). Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dan keterpaduan program dalam satu komando supaya efektif dan efisien, (c). Penguatan lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan di bidang kebencanaan (Tagana), (d). Melakukan pemberdayaan agar masyarakat siaga akan bencana yang mungkin terjadi setiap waktu, sehingga dapat meminimalisir resiko bencana.

Bagi masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana saran yang dapat diberikan anatara lain: (a). Penyuluhan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, melalui sosialisasi, demonstrasi (pemutaran film, CD) dan simulasi siaga bencana agar masyarakat sadar dan berdaya menghadapi bencana dan resikonya. (b). Penyediaan sistem peringatan bahaya, sistem komunikasi darurat dan informasi bencana. (c). Penyiapan tindakan darurat, seperti evakuasi penduduk ke tempat yang lebih aman dan penyimpanan bahan (logistik) apabila sewaktu-waktu diperlukan, penyiapan barak pengungsian untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi harta benda serta mengurangi resiko bencana. (d). Pemasangan rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi. (e). Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas, kepolisian, PMI, lembaga donasi, relawan, aparat desa/kecamatan, LSM, Tim SAR, ORARI dan RAPI. (f). Perlu dibentuk tim penanggulangan resiko bencana berbasis masyarakat pada tingkat desa, kecamatan di daerah-daerah rawan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Ch. (2003). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pengungsi*, www. Google.com
- Elizabeth, N.. (1965). *A Primer of Sosial Case Work*, New York, Columbia University Press
- Gunanto dkk. (2004). *Uji Coba Konsep Model Penyelesaian Masalah Pengungsi Perantau Di Tempat Penampungan Sementara Daerah Asal*, Yogyakarta, B2P3KS
- Harian Kedaulatan Rakyat, *Program Trauma Healing Dibutuhkan Pengungsi Barak*, 3 Januari 2011
- Heru (2006). *Bencana dan Penanganannya*, Jurnal Pusdiklat Kesos, Vol. 1 No 2, Juni 2006, Departemen Sosial
- LP. Getubig dan Sonke S. (1992). *Rethinking Sosial Security-Reaching Out to The Poor*, Frankfurt, APDC
- Marjono.(2010). *Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Merapi*, http://www.jatengprov.go.id/?mid = wartadaera & listStyle = gallery & category = 4254 & document_srl = 11905
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rusdakarya
- Sumarnonugroho. (1984). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Hanindita.
- Suroso. (2006). *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi*, Jurnal Pusdiklat Kesos, Vol. 1 No. 2 Juni 2006